



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

UNIT KERJA : SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **FAISAL RIZAL**
2. Jabatan : **LURAH**
3. NHK : **223810**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 2.150.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 600.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/45 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 152.650.000**

1. MOTOR, HONDA REVO SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.650.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS 1.5 Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 5.500.000**

D. SURAT BERTAHAP **Rp. ----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp. 78.175.700**

F. HARTA LAINNYA **Rp. ----**

Sub Total **Rp. 2.386.325.700**

III. HUTANG **Rp. 770.000.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp. 1.616.325.700**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.